



Sulsel Kecipratan Rp52,44 Triliun

Sulsel Keciprat Rp52,44 Triliun

Alokasi DIPA APBN 2025

REPORTER MUH MUCHTASIM
EDITOR YUKEMI KOTO

MAKASSAR, FAJAR -- Pembangunan di Sulsel dalam banyak sektor, masih terus digenjut. Pemerintah pusat siap menguyur anggaran lebih dari Rp52 triliun.

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, melalui Kepala Kanwil Supendi, menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga di Sulsel.

Tuntutan hadir dalam kegiatan tersebut PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatka Dewi, pada acara penyerahan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 16 Desember.

|| Baca Sulsel... Hlm 11

TKD DIPA APBN

● Pemprov Sulsel: Rp4,51 Triliun	● Bulukumba : Rp 1,31 T
● Tana Toraja : Rp 0,98 T	● Bantaeng : Rp 0,73 T
● Parepare : Rp 0,61 T	● Enrekang : Rp 0,91 T
● Makassar : Rp 2,46 T	● Sidrap : Rp 0,97 T
● Jeneponto : Rp 1,05 T	● Baru : Rp 0,74 T
● Palopo : Rp 0,69 T	● Pangkep : Rp 1,21 T
● Bone : Rp 2,23 T	● Luwu Timur : Rp 1,22 T
● Sinjai : Rp 0,95 T	● Wajo : Rp 1,35 T
● Selayar : Rp 0,90 T	● Soppeng : Rp 0,97 T
● Toraja Utara : Rp 0,97 T	● Gowa : Rp 1,68 T
● Pinrang : Rp 1,17 T	
● Maros : Rp 1,22 T	
● Takalar : Rp 0,95 T	
● Luwu Utara : Rp 1,21 T	
● Luwu : Rp 1,29 T	

Sulsel Keciprat Rp52,44 Triliun

|| Lanjutkan Halaman... 9

Rinciannya, pagu belanja pemerintah pusat senilai Rp19,64 triliun yang dikelola oleh 746 satuan kerja (satker). Satker ini berasal dari 38 kementerian dan lembaga.

Lalu, ada alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp32,80 triliun atau naik Rp3,2 persen dibanding 2024. Alokasi TKD diberikan ke Pemprov Sulsel dan 24 pemerintah kabupaten/kota.

Rincian alokasi BPP Rp19,64 triliun. Diketahui BPP terdiri dari belanja pegawai Rp10,05 triliun. Belanja pegawai naik 8,18 persen.

Lalu, belanja barang Rp7,23 triliun, angka ini turun 19,85 persen. Kemudian Belanja Modal

Rp2,27 triliun, angka ini juga turun 50,44 persen. Serta Belanja Bansos Rp92 miliar, naik 15,35 persen.

"Alokasi belanja barang 19,85 persen dan belanja modal turun signifikan 50,44 persen. Hal ini jadi tantangan bagi kita mewujudkan pembangunan di Sulsel dengan keterbatasan anggaran yang ada," ujar Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi.

Selanjutnya, lokasi TKD Rp32,80 triliun. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,12 triliun, naik 10,91 persen. Lalu, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp21,47 triliun, naik 6,81 persen. Ada juga Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Rp1,62 triliun, turun 40,16 persen. Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun, mening-

kat tipis 0,11 persen. DAK nonfisik alokasinya Rp6,35 triliun, meningkat 9,69 persen. Serta dana Insentif Fiskal Rp210,15 miliar, dengan meningkat 44,78 persen.

Sejatinya, secara total ada penurunan DIPA tahun 2025. Untuk tahun 2024, DIPA APBN sebesar Rp58 triliun. Walaupun secara total APBN meningkat, namun untuk Sulsel terjadi penurunan khususnya ke Satker K/L.

"Karena memang ada beberapa proyek yang sudah selesai. Kandungan uang yang terbatas kan kita harus membangun dengan merata di seluruh Indonesia," terang Supendi.

Dana Transfer ke Daerah, ada peningkatan. Ini bukti bahwa pemerin-

tas pusat memberikan perhatian ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kemiskinan ekstrem tahun 2025 di angka nihil atau nol.

"Dan juga terkait dengan masalah ketahanan pangan, salah satunya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa membangun perekonomian di daerah juga," tandasnya.

PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi, Sulsel mendapatkan TKD Rp4,91 triliun yang menyumbang APBD 2025. Ia meminta agar anggaran itu dioperasikan secara efektif seperti program-program kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak kepada

masyarakat.

"Ikuti arahan presiden, kurangi belanja-belanja yang tidak penting, misalnya rapat di hotel, kegiatan seminar yang berulang, kemudian perjalanan dinas yang tidak langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu dikurangi," beber

Prof Zudan.

Anggaran ini juga berfungsi untuk menopang program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yaitu MBG. Program ini semuanya berasal secara sentral dari pusat pada 2025. Nantinya, Dinas Pendidikan akan menjadi leader, dan diban-

tu oleh Dinas Kesehatan Dinas PPPA, dan Din Ketahanan Pangan.

"Kita sudah berkoordinasi untuk semua segera mengeksekusi semua kegiatan program dan kegiatan di awal tahun agar ekonomi Sulsel bergerak," tandas Pr Zudan. (*)



BENTUK KESYUKURAN. Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Jemaat Vi Dolorosa menggelar perayaan menyambut Natal di Gereja Wilayah Timur Ji Perint Kemerdekaan, akhir pekan lalu.

Berbagi Kasih Lebih Dini Sambut Natal